

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM  
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

Skripsi, 3 Juli 2023

REZA RIZKYNATA

ANALISIS PENGAWASAN PERLAKUAN PELAKSANAAN SARAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MANAJEMEN

PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

**ABSTRAK**

Ombudsman Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan mendeskripsikan mengenai pengawasan perlakuan pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia dalam manajemen pencegahan maladministrasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dengan 5 indikator, yaitu pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, tindakan disiplin, dan tindakan koreksi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pemantauan dalam pelaksanaan saran perbaikan sudah memiliki regulasi yang cukup jelas, hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Ombudsman nomor 41 Tahun 2019 tentang tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, namun terdapat kendala yang terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia pada Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran. Pada indikator pemeriksaan atau disebut juga sebagai monitoring informasi pelaksanaan saran dapat dilakukan melalui bersurat, pertemuan, tinjauan lapangan, FGD, bimtek dan mencari informasi melalui sumber sekunder. Pada indikator bimbingan dan arahan ORI dapat memberikan pendampingan yang diajukan oleh instansi/Lembaga penerima saran perbaikan dengan fleksibel, karena tidak ada SOP yang mengatur secara baku mengenai pelaksanaan pendampingan. Pada indikator Tindakan disiplin ORI tidak dapat memberikan hukuman kepada instansi/Lembaga yang tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan, hal ini dikarenakan dalam melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan Ombudsman RI tidak boleh melewati batasan-batasan yang ada. Pada indikator tindakan koreksi diketahui kewenangan Ombudsman RI dalam pengawasan perlakuan pelaksanaan saran hanya sampai tahap publikasi kepada media dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, Kepala Daerah, dan juga DPRD terhadap instansi/Lembaga yang sama sekali tidak melaksanakan saran perbaikan yang telah diberikan.

Daftar Pustaka : 47 Referensi

Kata Kunci : Pengawasan, Pemantauan, Ombudsman

# **FACULTY OF SOSIAL AND POLITICAL SCIENSPUBLIK**

## **ADMINISTRATION**

*Thesis, 3 July 2023*

**REZA RIZKYNATA**

### **ANALYSIS OF SUPERVISION OF THE TREATMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OMBUDSMAN'S ADVICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE MANAGEMENT OF PREVENTING MALADMINISTRATION**

#### **ABSTRACT**

*The Ombudsman of the Republic of Indonesia is an institution that has the authority to supervise the implementation of public services. However, monitoring the implementation of public services has not run optimally. Therefore this study aims to analyze and describe the supervision of the treatment of the implementation of the suggestions of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in the management of maladministration prevention. This study uses the theory of supervision with 5 indicators, namely monitoring, inspection, guidance and direction, disciplinary action, and corrective action. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of the research show that monitoring indicators in the implementation of recommendations for improvement already have quite clear regulations, this can be seen through Ombudsman Regulation number 41 of 2019 concerning procedures for preventing maladministration in the implementation of public services, however there are obstacles that occur due to limited human resources in Assistance with the Implementation of Suggestions. In terms of inspection indicators or also known as monitoring, information on implementation of suggestions can be done through letters, meetings, field visits, FGDs, technical guidance and seeking information through secondary sources. In the guidance and direction indicators, ORI can provide assistance that is proposed by agencies/institutions receiving suggestions for improvement flexibly, because there is no standard SOP that regulates the implementation of assistance. In the ORI disciplinary action indicator, it cannot impose penalties on agencies/agencies that do not implement the corrective suggestions that have been given, this is because in monitoring the implementation of the RI Ombudsman's suggestions for improvement, the RI Ombudsman may not exceed existing boundaries. On the corrective action indicator, it is known that the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in supervising the treatment of the implementation of suggestions only up to the publication stage to the media and submitting reports to the President, DPR, Regional Heads, and also the DPRD for agencies/agencies that have not implemented the corrective suggestions that have been given at all.*

**Bibliography** :47 Refences

**Keywords** :Supervision, Monitoring, Ombudsman